

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 27 Mei 2006 pukul 05.53 WIB terjadi gempa bumi yang berdampak langsung terhadap Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah. Di DIY, peristiwa tersebut berdampak pada keempat kabupatennya, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan kotamadya Yogyakarta. Di sebelah barat dan utara Yogyakarta, enam kabupaten di Jawa Tengah juga terkena dampaknya yaitu Boyolali, Klaten, Magelang, Purworejo, Sukoharjo, dan Wonogiri. Dua kabupaten yang paling parah terkena bencana itu adalah kabupaten Bantul, DIY dan kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Data Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Nasional melalui <http://www.bakornas.go.id>. diakses tanggal 10 Desember 2007).

Gempa pada pagi hari yang membangunkan warga Yogyakarta dan sekitarnya itu menewaskan lebih dari 5.700 orang, melukai puluhan ribu orang dan menghancurkan ratusan ribu rumah. Karena masih tergolong pagi hari, gempa ini membuat banyak orang terperangkap di dalam rumah khususnya anak-anak dan orang tua. Tak heran jika mayoritas korban merupakan orang yang berusia lanjut dan anak-anak yang kemungkinan tidak sempat menyelamatkan diri ketika gempa belangsung. Berdasarkan informasi data

litening dari Yogyakarta Media Center pada tanggal 7 Juni 2006 jumlah

korban mencapai 5.716 orang tewas dan 37.927 orang luka-luka (Data Satkorlak Penanggulangan Bencana Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta th. 2006).

Pemerintah Indonesia menanggapi bencana itu dalam jangka waktu beberapa jam kemudian dan mengalokasikan Rp 5 triliun dan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Jogja dan DIY. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba Yogyakarta beberapa jam setelah gempa terjadi dan berpindah kantor di Gedung Agung Yogyakarta sejak tanggal 27 Mei 2006 hingga 31 Mei 2006 untuk memonitor upaya pengiriman bantuan dan penganggulangan bencana alam. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas) yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla melaksanakan koordinasi awal pengiriman bantuan dan upaya penyelamatan (http://www.gudeg.net/gempa_detail_berita.php?act=view&id=3193&idkNya=0&iddNya=0&lang_ver=ind diakses tanggal 10 Desember 2007). Sejarah kejadian gempa bumi merusak yang terjadi di wilayah Yogyakarta tercatat tiga kejadian. Pertama, pada tahun 1867, 372 rumah roboh, 5 orang meninggal. Pada tahun 1943, 213 orang meninggal, 2.096 orang luka-luka, dan 2.800 rumah hancur. Dan pada tahun 1981, hanya tercatat gempa yang mengakibatkan dinding Hotel Ambarukmo retak-retak. Dengan rangkaian peristiwa ini, wilayah Yogyakarta dapat dikategorikan rawan bencana gempa bumi (http://www.bmg.go.id/berita/0601/21/oni01.html/Iakarta_2006 diakses

Bantul dan Klaten merupakan daerah yang paling parah terkena dampak gempa. Di Klaten, sekitar 72% dari total rumah hancur dan 95% korban jiwa dan luka berat terjadi di Bantul dan Klaten. Sekitar 66.000 rumah di Klaten rusak, sedangkan di Bantul sekitar 47.000 rumah rusak. Berdasarkan survey di lapangan, 74% dari keluarga yang kehilangan rumahnya karena rusak total tinggal dalam sebuah tenda yang mereka dirikan sendiri di depan rumah mereka masing-masing. Di samping untuk melindungi keluarga mereka dari panas dan dinginnya malam, harta benda mereka yang masih tertinggal juga dapat mereka lindungi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada beberapa daerah, satu tenda dapat ditempati oleh sekitar satu RT warga lengkap dengan dapur umum dan fasilitas seadanya (Pemerintah Provinsi DIY. Laporan Awal Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana DIY dan Jateng 2006).

Lemahnya komitmen kerakyatan Pemerintahan SBY-JK, terutama dalam penanganan berbagai korban bencana. Misalnya, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias tidak bekerja sesuai harapan. Lalu untuk korban bencana gempa Yogyakarta, pemerintah terlalu banyak janji yang tidak dipenuhi secara optimal. Hanya karena alasan ketidakuratan data, bantuan yang dijanjikan pemerintah untuk para korban gempa Yogyakarta tidak dikucurkan maksimal. Seharusnya sambil memperbaiki data korban, bantuan tetap diberikan sesuai janji (SKH Keadilan Rakyat edisi Selasa, 6 Juni 2006

Hasil survei yang berdampak aksi demonstrasi masyarakat Bantul yang berakhir anarkhis dengan pengrusakan kantor ini, dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Swasta DIY sebagai upaya untuk memperoleh gambaran aktual tentang tingkat ketepatan sasaran bantuan JRF-REKOMPAK di Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, menunjukkan bahwa tingkat ketepatan sasaran bantuan rumah JRF-REKOMPAK masih rendah yaitu hanya 60 %. Sedangkan sisanya 40 % bantuan JRF-REKOMPAK tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran ini disebabkan adanya penyimpangan kriteria yang sudah ditetapkan oleh manajemen JRF-REKOMPAK. Adapun penyimpangan kriteria yang dimaksud secara berurutan prosentasenya adalah kriteria membangun di tempat semula (62%); kriteria rumah tangga/keluarga korban gempa bumi (26%); kondisi rumah roboh atau rusak berat (11%) dan kriteria lainnya (1%). Laporan Survei Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan *Java Reconstruction Fund* -Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (JRF-REKOMPAK) di Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta (Litbang LOS DIY, Desember 2007).

Kepala Desa Selopamiro, Imogiri, Kabupaten Bantul, Sukro Nurharjono mengatakan penelitian LOS itu benar adanya. "LOS itu benar!" tandas Sukro yang juga menjadi sekretaris APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) kepada *mediacenter-ajiyogya* di kantornya, Rabu (12/3). Menurut Sukardiono, APDESI adalah organ yang mendatangkan massa ke kantor LOS. Dengan pernyataannya itu, Sukro mengakui jika sekira 40 persen penerima bantuan rumah dari JRF-REKOMPAK adalah orang-

orang yang tidak tepat. Hebatnya, ia mau mengakui jika ketidaktepatan sasaran itu juga terjadi di wilayah kekuasaannya. Seperti diakuinya, ada sekira 100 orang yang menerima bantuan rumah dari JRF-REKOMPAK. Tetapi dari situs www.rekompakjrf.org, Selopamioro hanya mendapat jatah 91 buah (http://www.mediacenterajiyogya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=317&Itemid=39).

Secara administratif, segala fungsi koordinasi dalam masyarakat dipegang oleh pemerintah. Dalam kondisi darurat seperti terjadinya bencana alam, perang, dan lain sebagainya, kepala pemerintahan dalam hal ini presiden bersama DPR dapat menyatakan perang, darurat sipil maupun darurat militer. Pemerintah membentuk peraturan-peraturan dan jika perlu pemerintah membentuk lembaga lembaga untuk menangani fungsi-fungsi spesifik. Dalam kondisi darurat bencana pemerintah melalui lembaga yang dibentuk menangani permasalahan bencana alam dan pengungsi, Bakornas sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk dalam penanganan bencana, akan bertindak cepat menangani korban. Kekuatan hukumnya akan disahkan melalui peraturan-peraturan resmi mulai dari undang-undang hingga keputusan-keputusan di tingkatan yang lebih rendah (Irwanto, OA. 2006. Respon Pemerintah Terhadap Bencana. Studi Tentang Pengelolaan Kondisi Darurat Bencana Pemerintah Kabupaten Bantul di Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Yogyakarta 2006. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Tidak dipublikasikan)

Pascagempa, ada satu presiden, tujuh menteri, dan satu gubernur berkantor di Yogyakarta, tetapi koordinasi penanganan bencana tidak optimal dan cenderung berantakan. Upaya pertolongan tidak berdasarkan program yang sistematis. Kehadiran banyak pejabat negara seolah hanya rombongan manusia yang memberi hiburan, bukan solusi terhadap penderitaan warga. Rumus dasar *rescue* baru *recovery* seolah tidak dipahami. (http://www.gudeg.net/gempa_detail_berita.php?act=view&id=3193&idkNya=0&iddNya=0&lang_ver=blogger.riswandha.ind diakses tanggal 10 Desember 2007).

Listrik mati, komunikasi tidak jalan. Maka tindakan awal (selain menolong korban) adalah mencari sumber listrik alternatif (seperti *genset*) dan mengerahkan seluruh alat komunikasi (*CB radio*) yang ada. Demikian pula dengan alat transportasi. Bisa saja misalnya, pemerintah memerintahkan mobilisasi seluruh mobil dinas pemerintahan yang ada di Yogyakarta. Tindakan itu sah dilakukan, sebab pemerintah memiliki kapabilitas regulatif untuk kebaikan publik. Jadi keluhan mengenai bahan pangan atau pakaian, bisa diatasi dengan memerintahkan seluruh toko dan gudang yang ada, yang tiba-tiba tutup (padahal bangunannya utuh) untuk membongkar isinya dan digunakan untuk menolong rakyat. Tampaknya otoriter, tetapi itulah seni memimpin. Pemimpin sejati paham betul kapan dan sampai tingkat apa dialog diberikan toleransi, lalu mengambil-keputusan untuk bertindak bila dia yakin akan ketepatan waktunya (Proyek Sphere, 2006 Piagam Kemanusiaan dan

Namun kenyataan di lapangan tidaklah semudah membandingkan. Pemerintah daerah setempat seolah masih tidak dapat bekerja pada saat krisis sedemikian rupa. Bantuan yang datang secara cepat disertai ribuan relawan yang masuk ke Yogyakarta masih tidak tertangani dengan baik. Pemerintah masih memerlukan waktu untuk bangkit dari kondisinya yang sedemikian rupa untuk kemudian mengkoordinasikan dan meregulasikan bantuan yang sangat banyak jumlahnya. Disitulah kemudian timbul persoalan.

Salah satu tugas penting pemerintah adalah fungsi koordinasi. Pemerintah mengkoordinasikan dan meregulasikan segala kebutuhan rakyat dalam kondisi apapun. Dan kegiatan yang cukup penting ini terkadang tidak dapat dilakukan secara maksimal karena pemerintah yang merupakan institusi yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam fungsi ini oleh rakyat justru ikut menjadi korban. Sedangkan masyarakat korban bencana tidak dapat menunggu birokrasi beserta aparat pemerintah bangkit kembali untuk menyelesaikan tugasnya. Bantuan yang berdatangan mengalir tidak merata ke berbagai daerah di lokasi gempa tersebut.

Demikian pula untuk daerah Kec. Dlingo lokasinya yang jauh dari pusat pemerintah kabupaten, merasakan akibat ketidakmerataan distribusi bantuan tersebut dari mulai tahap tanggap darurat hingga rekonstruksi paska gempa. Hingga sekarang ketidak merataan dan ketidaktepatan penyaluran dana gempa masih terjadi hingga menimbulkan keresahan, karena adanya rumor/isu-isu penyelewengan, dan atau pemotongan yang tidak jelas dari mana asalnya. Hal tersebut timbul berawal pada ketidakpuasan masyarakat

kepada pemerintah sehingga masyarakat memandang perlu melakukan tindakan guna “mengingatkan” pemerintah akan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Seperti halnya peristiwa yang baru saja terjadi adalah masyarakat Kec. Dlingo melakukan demonstrasi ke Kantor Kabupaten Bantul, meminta Bupati dan DPRD menyelidiki dan menindak aparat dusun yang di-isukan menyelewengkan penyaluran dana bantuan dana rekonstruksi paska gempa. Kemudian beberapa hari sesudahnya masyarakat Kec. Dlingo juga melakukan demonstrasi besar-besaran kepada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Yogyakarta yang melakukan survey tentang dana bantuan gempa, yang disinyalir memanfaatkan momentum gempa untuk mencari keuntungan dengan cara mengatasnamakan masyarakat Bantul, khususnya Kec. Dlingo guna mendapatkan dana bantuan paska gempa dari luar negeri. Bahkan demonstrasi tersebut berakhir dengan anarkhis yaitu dengan dirusaknya kantor salah satu LSM tersebut (SKH Kedaulatan Rakyat, 6 Pebruari 2008. hal. 6).

Pada dasarnya seluruh masyarakat Bantul, khususnya masyarakat Kec. Dlingo seluruhnya telah menerima bantuan dana paska gempa, artinya tidak ada masyarakat Kec. Dlingo yang tidak menerima dana bantuan. Akan tetapi memang tidak bisa berurutan dalam arti setiap ada pengucuran dana bantuan langsung semua masyarakat bisa mendapatkan dana tersebut, tetapi secara bergiliran yaitu misalnya: untuk tahap pertama sebagian masyarakat

sudah menerima pada tahap sebelumnya tidak mendapatkan, akan tetapi masyarakat yang belum menerima pada tahap sebelumnya pada saat itu menerima(http://www.gudeg.net/gempa_detail_berita.php?act=view&id=3193&idkNy=0&iddNya=0&lang_ver=ind diakses 10 Desember 2007).

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Budi Wahyuni dalam survey bahwa ditemukan penyimpangan/tidak tepat sasaran pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan gempa 2006, misalnya: menurut kriteria yang telah ditetapkan, pada rumah yang terdiri dari multi KK terpisah dan mandiri dimana salah satunya telah mendapatkan bantuan dari pihak lain, maka mereka hanya berhak maksimal mendapatkan satu bantuan, kemudian mereka yang tidak tinggal di Bantul sebelum gempa bumi 27 Mei 2006. Ia baru datang dan bermukim di Bantul pasca gempa, namun mendapatkan bantuan (Laporan Litbang LOS DIY, 2007). Selain itu di salah satu dusun di Kec. Dlingo Kepala Dusunnya melakukan pemotongan dana bantuan yang alokasinya tidak transparan, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan masyarakat pun melakukan demonstrasi ke Kantor Bupati Bantul meminta agar menyelidiki dan bila terbukti melakukan penyimpangan agar ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku (SKH Kedaulatan Rakyat, 6 Februari 2008. hal. 6)

Di atas perbukitan di wilayah Imogiri, Kabupaten Bantul, ada seorang janda tua yang rumahnya ikut roboh akibat gempa bumi yang menggoyang Yogyakarta 27 Mei 2006 silam. Sesuai aturan, ia seharusnya menjadi anggota

kelompok masyarakat (pokmas) dan berhak mendapat dana rekonstruksi (dakon) sebesar Rp 15 juta. Tetapi ia tidak menjadi anggota pokmas, kedudukannya 'diwakili' aparat dusun yang kemudian membuatkan rumah untuknya. Ada dua warga lainnya yang bernasib sama, mendapatkan rumah sederhana dengan ongkos sekira Rp 7,5 juta per rumah. Janda tua itu adalah salah satu dari puluhan ribu warga korban gempa yang jatah dakonnya dipotong aparat pemerintah desa. Ya, bukan rahasia umum lagi jika pembagian dakon (ada tiga kategori rusak berat mendapat Rp 15 juta, rusak sedang Rp 4 juta dan rusak ringan Rp 1 juta) mengalami 'penyunatan'. Ini hampir terjadi di seluruh pelosok Yogyakarta. Pelaku 'penyunatan massal' ini adalah aparat desa yang bekerja sama dengan panitia pembagian dakon. Besarnya bervariasi mulai Rp 10 ribu hingga Rp 11 juta. Dana hasil sunatan ini pun mengalir sampai jauh dan ke mana-mana. Sayangnya, aparat penegak hukum tidak mengusut kasus ini dengan tuntas. Padahal, masyarakat sudah melaporkan hal ini (termasuk ke DPRD), menggelar aksi unjuk rasa dan dimuat di media massa. Tetapi hingga dua tahun pasca gempa bumi, kasus yang masuk ke meja hijau tidak lebih dari jumlah jari di tangan (http://www.mediacenterajiyogya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=317&Itemid=39 di akses 10 Desember 2008).

Dari investigasi AJI Yogyakarta (www.mediacenter-ajiyogya.com) di lapangan ada tiga pola sunatan masal ini. Pertama, aparat desa melakukan pemotongan terhadap warga yang benar-benar menjadi korban bencana.

Alasannya untuk 'kearifan lokal' seperti dibagikan kepada warga korban lain

yang tidak mendapatkan bantuan atau membangun fasilitas umum. Sayang, pertanggungjawabannya tidak jelas. Kedua, memanipulasi data. Memasukan nama warga ke dalam kategori tertentu tetapi dengan kesepakatan jika namanya masuk maka dananya harus dipotong. Misalnya, warga yang rumahnya rusak sedang tetapi dimasukkan dalam kategori rusak berat. Bahkan ada yang sama sekali tidak rusak atau rusak sedang tetapi dimasukkan dalam rusak berat. Ketiga, dakon dipotong untuk berbagai keperluan, misalnya mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (padahal Pemkab Bantul menggratiskan), 'tali asih' aparat desa, membangun balai desa (padahal APBN sudah menganggarkan), 'biaya pemberkasan' (harusnya gratis), membayar fasilitator (sudah digaji pemerintah) dan masih banyak lainnya (http://www.mediacenterajiyogya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=317&Itemid=39 di akses 10 Desember 2008).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sampai sejauh manakah persepsi masyarakat terhadap pemerintahan SBY-JK yang berkaitan dengan masalah penanganan bantuan dan korban bencana gempa, sehingga masyarakat Kabupaten Bantul seakan-akan diabaikan, terutama masyarakat Kec. Dlingo yang secara geografis terletak paling ujung dari pusat pemerintahan Kabupaten Bantul. Masyarakat merasa hanya diperhatikan pemerintah jika pemerintah mempunyai maksud-maksud tertentu yang berkaitan dengan popularitas politik saja. (http://www.gudeg.net/gempa_detail_berita.php?act=view&id=3193=0&iddNya=0&lang_ver=blogger.riswandha.ind diakses tanggal 10 Desember 2007).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana persepsi masyarakat Dlingo, Bantul, Yogyakarta terhadap Kredibilitas SBY-JK dalam proses penyaluran bantuan dana pasca gempa Mei 2006?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Dlingo, Bantul, Yogyakarta terhadap kredibilitas SBY-JK pasca bantuan dana gempa?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada persepsi?

D. Kerangka Teori

1. Persepsi

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan manafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. Hal ini jelas tampak pada definisi John R. Wenburg dan William W. Wilmot (Deddy Mulyana, 2001:167) persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi

makna. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antarindividu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau identitas.

Menurut Deddy Mulyana (2001;173) persepsi manusia terbagi dua: persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia (persepsi sosial). persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks, karena manusia bersifat dinamis. Persepsi terhadap lingkungan fisik berberda dengan persepsi terhadap lingkungan sosial. Perbedaan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Orang lebih aktif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit di ramaikan.
- b. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). Kebanyakan objek tidak mempersepsi anda ketika anda mempersepsi objek-objek itu. Akan tetapi orang mempersepsi anda pada saat anda mempersepsikan mereka, dengan kata lain persepsi terhadap manusia bersifat interaktif.

- c. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.

Persepsi merupakan proses untuk memahami lingkungannya meliputi objek, orang, dan simbol atau tanda yang melibatkan proses kognitif (pengenalan). Proses kognitif adalah proses dimana individu memberikan arti melalui penafsirannya terhadap rangsangan (stimulus) yang muncul dari objek, orang, dan simbol tertentu. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan, pengorganisasian, dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Hal ini terjadi karena persepsi melibatkan penafsiran individu pada objek tertentu, maka masing-masing objek akan memiliki persepsi yang berbeda walaupun melihat objek yang sama (Gibson, 1996; 134).

Menurut Walgito (1997; 53) agar individu dapat menyadari dan dapat membuat persepsi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu berikut ini :

- a. Adanya objek yang dipersepsikan (fisik).
- b. Adanya alat indera/reseptor untuk menerima stimulus (fisiologis).
- c. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi (psikologis).

Dari definisi di atas maka pengertian persepsi dalam penelitian ini

adalah merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam perkataan lain, persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuly*) (Rakhmat, 1993; 51).

Perilaku seseorang tidak bisa lepas dari persepsi stimulus yang dihadapinya. Setiap orang mungkin telah mengalami betapa berbedanya suatu obyek atau peristiwa yang tampak atau terjadi pada latar belakang yang berbeda. Individu cenderung untuk melihat segala sesuatu di dalam totalitas yang tersusun. Dalam konteks total atau latar belakang tempat bermunculnya stimulus tertentu akan mempengaruhi persepsi individu pada stimulus tersebut.

Irwanto (1997:76) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Persepsi merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya (Walgito, 1997:114). Namun proses itu tidak berhenti, melainkan stimulus itu diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu mengalami persepsi. Persepsi menurut Atkinson (1997:207) adalah proses mengasosiasikan dan menafsirkan pola stimulus ini ke dalam lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan persepsi adalah proses pengamatan individu terhadap stimulus yang didahului oleh penglihatan, pendengaran, perasaan maupun penciuman. Persepsi merupakan suatu

pengamatan terhadap objek atau peristiwa orang lain, berdasarkan interpretasi individu sehingga individu menyadari dan mengerti apa yang diinderakannya.

a. Aspek-aspek yang berpengaruh pada persepsi

Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia luar. Individu mengenali dunia luar dengan menggunakan indera. Individu mengenal dirinya sendiri maupun keadaan sekitarnya sangat berkaitan dengan persepsi. Begitu pula untuk dapat bersikap dan melakukan tindakan tertentu, seorang pemain sepakbola harus memiliki kesan khusus tentang obyek yang dihadapinya. Kesan yang didapat pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk memberikan penilaian tertentu pula. Proses psikologis inilah yang dikenal dengan persepsi.

Menurut Walgito (1997:117) stimulus yang diterima oleh individu diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang obyek yang diindera. Inilah yang disebut persepsi. Persepsi memiliki sifat subyektif, artinya proses untuk menyeleksi dan menginterpretasi terhadap kesan-kesan yang diterima individu berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan adanya obyek yang sama dipersepsikan berbeda-beda oleh dua atau lebih orang yang berbeda. Menurut Wirawan (2000:58) perbedaan dalam persepsi dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1). Perhatian

Dalam perhatian biasanya kita hanya memfokuskan pada satu atau dua obyek saja. Perbedaan fokus perhatian ini menyebabkan perbedaan persepsi.

2). Set

Set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul. Harapan antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda terhadap suatu obyek.

3). Kebutuhan

Kebutuhan sesuatu yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi seseorang. Dengan demikian kebutuhan yang berbeda-beda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

4). Sistem Nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh terhadap persepsi, misalnya pemain bola dari keluarga miskin dan pemain bola dari keluarga kaya akan berbeda mempersepsikan nilai mata uang maupun insentif.

5). Ciri Kepribadian

Ciri kepribadian akan mempengaruhi terhadap persepsi. Orang yang berkepribadian pemalas dan orang yang berkepribadian penuh percaya diri akan berbeda mempersepsi terhadap obyek yang sama.

6). Gangguan Kejiwaan

Gangguan kejiwaan dapat menyebabkan kesalahan persepsi yang disebut

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Rakhmat (2000:63) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi berdasarkan obyeknya ada dua, yaitu persepsi interpersonal bila obyeknya adalah manusia dan persepsi obyek dengan obyek persepsi selain manusia. Persepsi interpersonal dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor situasional dan faktor personal.

1). Faktor-faktor situasional yang mempengaruhi persepsi interpersonal adalah:

a) Deskripsi Verbal

Deskripsi verbal yang diterima individu mengenai sifat-sifat obyek persepsi berpengaruh terhadap persepsi individu.

b) Petunjuk *Proksemik*

Proksemik adalah tentang penggunaan jarak dalam penyampaian pesan, jarak yang dibuat dalam berinteraksi berpengaruh terhadap persepsi individu.

c) Petunjuk Kinetik

Gerakan tubuh seseorang dapat mempengaruhi persepsi individu orang tersebut.

d) Petunjuk Wajah

Ekspresi wajah seseorang juga dapat mempengaruhi persepsi

Tinggi rendahnya suara, tempo berbicara, dialek dan interaksi ketika berbicara.

f) Petunjuk Artifaktual

Meliputi penampilan seseorang, misalnya gaya berpakaian, model rambut, tanda kepangkatan dan atribut-atribut lainnya.

2). Faktor-faktor personal yang berpengaruh terhadap persepsi interpersonal adalah:

a) Pengalaman

Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi individu, pengalaman tidak selalu lewat proses belajar melainkan juga bertambah melalui rangkaian peristiwa yang dialami individu.

b) Motivasi

Motif-motif yang dapat mempengaruhi persepsi adalah motif biologis, ganjaran dan hukuman karakteristik serta perasaan terancam karena pesona stimuli. motivasi secara umum di artikan sebagai sesuatu yang ada pada diri seseorang yang dapat mendorong, mengaktifkan, mengerakkan dan mengarahkan perilaku seseorang dalam wujud niat, harapan, keinginan dan tujuan yang ingin di capai.

Motivasi ada dalam diri manusia terdorong oleh adanya:

1. keinginan untuk hidup
2. keinginan untuk memiliki sesuatu
3. keinginan akan kekuasaan
4. Keinginan akan adanya pengakuan Secara singkat

Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan atau keinginan yang dapat dicapai dengan perilaku tertentu dalam suatu usahanya. Sedangkan motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi menunjukkan bagaimana usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang untuk bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang diinginkannya. Sedangkan motivasi menurut Jalaluddin Rakhmat (2005:91) motif-motif yang mempengaruhi persepsi adalah biologis, ganjaran dan hukuman karakteristik serta perasaan terancam karena pesona stimuli. Bila seseorang di hadapkan pada stimuli yang mengancam dirinya, seseorang akan beraksi bereaksi begitu rupa sehingga mungkin tidak akan menyadari bahwa stimuli itu ada.

Maka faktor motivasi yang dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dalam diri manusia, yang akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. Dengan demikian, motivasi akan berpengaruh terhadap performansi seseorang..

Menurut Hilgard dan Atkinson, tidaklah mudah untuk menjelaskan motivasi sebab:

1. Pernyataan motif antar orang adalah tidak sama, budaya yang

berbeda akan menyebabkan adanya motif yang berbeda pula

2. Motif yang tidak sama dapat diwujudkan dalam berbagai perilaku yang tidak sama.
3. Motif yang tidak sama dapat diekspresikan melalui perilaku yang sama.
4. Motif dapat muncul dalam bentuk-bentuk perilaku yang sulit dijelaskan
5. Suatu ekspresi perilaku dapat muncul sebagai perwujudan dari berbagai motif.

c) Kepribadian

Kepribadian seseorang turut mempengaruhi persepsi seseorang yang berkepribadian defensif misalnya, akan selalu menyalahkan orang lain dalam situasi netral sekalipun. Kepribadian adalah keseluruhan pola (bentuk) tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan bentuk tubuh serta unsur-unsur psiko-fisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam kehidupan seseorang melalui usahanya (<http://www.geocities.com/agus-lecturer/manajemen/teori-motivasi-prestasi-kepuasaan-kerja.htm>. di akses tgl. 18 September 2008). Sedangkan menurut Gordon W. Allport (1937) keseluruhan pola (bentuk) tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan bentuk tubuh serta unsur-unsur psiko-fisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain dapat dikatakan kepribadian mencakup semua aktualisasi dari (penampilan) yang selalu tampak pada diri seseorang merupakan bagian yang khas atau ciri

Dengan kata lain dapat dikatakan kepribadian yang mencakup semua aktualisasi dari (penampilan) yang selalu tampak pada diri seseorang. Misalnya ada orang yang memiliki sifat pemarah tetapi jujur, tekun bekerja, suka menolong, rajin bekerja, senang berolah raga, suka berpakaian yang sederhana, dan sebagainya. Dipihak lain, ada orang yang memiliki sifat penyabar, tenang, tekun bekerja, tetapi tidak suka bergaul, pendiam, pelit, suka berpakaian rapi, tetapi tidak suka bergaul, pendiam, pelit, suka berpakaian rapi, dan sebagainya. Pola-pola sifat, kebiasaan, kegemaran, dan sebagainya, yang dikemukakan di atas pola atau bentuk kepribadian seseorang.

2. Kredibilitas

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menunjang keberhasilan komunikasi agar tujuan dari proses komunikasi dapat tercapai dengan lebih efektif adalah sebagai komunikan, dalam hal ini adalah pejabat pemerintah yang berkepentingan terhadap rakyat/masyarakatnya, harus memiliki kredibilitas yang baik agar bisa memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat dengan semaksimal mungkin baik dalam segi isi pesan dan lambang atau bentuk penyajiannya, metode/cara komunikasi, dan juga berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana yang berkait dengan kepentingan komunikasi, serta situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif agar masyarakat lebih tertarik dan termotivasi dalam menerima isi pesan

komunikasi politik adalah seperangkat persepsi *communicate* tentang sifat-sifat komunikator. Dalam definisi ini terkandung dua hal:

- a. Kredibilitas adalah persepsi *communicate*; jadi tidak inheren dalam diri komunikator.
- b. Kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai komponen-komponen kredibilitas. Kredibilitas komunikator yang dimaksud adalah kredibilitas personal yang bersangkutan sebagai pelaksana komunikasi.

Adapun kredibilitas komunikator dalam penelitian di sini juga menyangkut:

- a. **Kepercayaan**, berkaitan dengan kesan masyarakat tentang kejujuran, ketulusan, adil, dan sopan tidaknya person yang menjadi komunikator dalam penyampaian materi pesan.
- b. **Keahlian**, berkaitan dengan kesan masyarakat tentang kecerdasan, pengalaman pejabat tersebut dalam menjalankan jabatannya, serta kemampuan pejabat dalam membelajarkan siswanya dan menjelaskan materi pelajaran yang disampaikannya.

Menurut Jalaluddin Rakhmat (1999,295) beberapa pendapat para ahli berdasarkan hasil studinya menyatakan bahwa efektivitas suatu komunikasi dalam kegiatan politik dan hubungan dengan masyarakat, banyak ditentukan oleh faktor komunikator dalam mempengaruhi perubahan sikap penerima pesan. Salah satu faktor mengenai efektivitas keberhasilan komunikator tersebut adalah kredibilitasnya (Jalaluddin Rakhmat (1999:295)

Pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator yang tingkat kredibilitasnya tinggi pasti akan lebih banyak memberikan pengaruh pada perubahan sikap penerima daripada jika disampaikan oleh komunikator yang tingkat kredibilitasnya rendah. Tak jarang jika masyarakat/rakyat salah menilai kredibilitas pejabat/pemimpinnya. Jika ada masyarakat yang menganggap pejabat/pemimpin yang menjalankan tugas jabatannya belum sesuai dengan kehendak masyarakat, salah satu penyebabnya menurut Cooper dan Jahda adalah bahwa masyarakat mengukur keahlian pejabat/pemimpinnya tersebut diukur berdasarkan oleh luas lingkup pandangannya sendiri. Apabila masyarakat meneruskan isi dari komunikasi tersebut, maka masyarakat tersebut memberi warna terhadap isi komunikasi itu menurut kerangka rujukan pikirannya sendiri.

Selain faktor kredibilitas komunikator, faktor-faktor lain yang juga perlu diperhatikan guna keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh pejabat/pemimpinnya adalah situasi dan kondisi lingkungan, metode komunikasi politik yang digunakan oleh pejabat tersebut dan bahasa dalam komunikasi politik. Baik bahasa verbal pengantar, maupun “bahasa” non verbal.

Studi tentang kepemimpinan yang kredibel sangat erat kaitannya dengan istilah-istilah seperti kekuasaan, otoritas (wewenang) serta kewibawaan yang melekat pada diri seorang pemimpin. Menurut Antlov (2002:83), pemimpin yang kredibel bagaimanapun juga memiliki kualitas keteladanan, termasuk didalamnya supremasi dan legitimasi. Dengan

demikian pemimpin yang kredibel memiliki apa yang oleh Max Weber disebut sebagai otoritas yang sah. Max Weber dalam (Gerth dan Mills, 1946: 51-55) menunjukkan bahwa pada dasarnya pada diri pemimpin terdapat wewenang (otoritas) yang dilegalkan warga yang dipimpinnya. Weber membagi otoritas legalitas menjadi tiga tahapan yaitu: (1) otoritas karismatis, (2) otoritas tradisional, dan (3) otoritas rasional.

Seorang pemimpin yang kredibel perlu memiliki sifat-sifat yang mendukung kepemimpinannya. Sifat-sifat kepemimpinan yang kredibel di mata rakyat/masyarakatnya menurut Terry (dalam Sutarto, 2001: 43), antara lain adalah: kecerdasan, inisiatif, kekuatan atau pendorong, kematangan perasaan, meyakinkan, kemahiran berkomunikasi, ketenangan diri, cerdik, daya cipta, dan berperan serta dalam pergaulan.

Sedangkan menurut Sank (dalam Sutarto, 2001: 39), sifat-sifat seorang pemimpin yang kredibel adalah: cerdas, pengertian, memiliki pengetahuan, banyak mengetahui pekerjaannya, berpandangan luas, kejujuran, dan delegator. Dari beberapa sifat kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, sifat-sifat kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang kepala negara agar kredibilitasnya tetap terjaga di mata rakyat/masyarakatnya adalah: cerdas, adil, memiliki pengetahuan umum, mampu berkomunikasi, jujur, mampu menjadi delegator, dan mempunyai daya cipta. Sifat-sifat kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menunjang keberhasilan kepala negara dalam memimpin rakyat/masyarakat berkeadilan dalam usaha mempengaruhi masyarakat agar mau

3. Masyarakat

Salah satu kehidupan manusia yang bersifat umum bahwa manusia pada dasarnya mempunyai sifat egois dan mempunyai sifat bebas dan sangat luas. Oleh sebab itu manusia baru dapat dikatakan manusia apabila ia dapat hidup di sekelilingnya bersama dengan manusia lainnya sebagai makhluk hidup yang mempunyai perasaan sosial dengan sifat-sifat yang dapat dibentuk sejak ia mulai bergaul dengan manusia lain, inilah yang disebut sebagai hidup bermasyarakat (Mansyur, 1993:22).

Yang dimaksud dengan hidup bermasyarakat adalah dimana sekelompok orang/manusia yang hidup bersama yang mempunyai tempat/daerah tertentu untuk jangka waktu yang lama dimana masing-masing anggotanya saling berhubungan satu dengan yang lain. Hubungan yang dimaksudkan adalah dapat berbentuk sikap, tingkah laku, maupun perbuatan. Dan segala tingkah laku atau perbuatan itu diatur dalam suatu tata tertib/undang-undang/peraturan tertentu yang biasa disebut/dikenal dengan hukum adat.

Kehidupan bermasyarakat pada umumnya sangat berbeda antara masyarakat satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan karena struktur masyarakat tersebut dan faktor tempat tinggal. Dari faktor tempat (tinggal) masyarakat tersebut, dapat digolongkan ke dalam masyarakat golongan tinggi, menengah, kota, pedesaan, dan lain-lain. Sedangkan pengertian masyarakat sendiri menurut kesimpulan Mansyur (1993: 26)

- c. Ukuran Kehormatan. Ukuran ini mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan/atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat teratas. Ukuran semacam ini banyak terdapat/dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa besar kepada masyarakat.
- d. Ukuran Ilmu Pengetahuan. Hal ini sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat-masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi ukuran tersebut kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif, oleh karena kemudian ternyata bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya. Hal tersebut menimbulkan usaha untuk mendapatkan gelar kesarjanaan tersebut dengan cara-cara yang tidak halal.

Ukuran tersebut di atas tidaklah bersifat limitatif, oleh karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat dipergunakan. Akan tetapi ukuran-ukuran tersebut yang sangat menonjol sebagai dasar timbulnya lapisan-lapisan dalam masyarakat.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus terfokus pada keinginan untuk mengetahui keragaman (*diversity*) dan kekhususan (*particularity*) objek studi. Hasil akhir yang ingin diperoleh adalah menjelaskan keunikan kasus yang dikaji (Agus Salim, 2006:122). Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu

sosial. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

Menurut Schramm dalam Yin (Robert K. YIN, 2004;17) esensi dari metode studi kasus adalah mencoba menjelaskan keputusan-keputusan tentang mengapa studi tersebut dipilih, bagaimana mengimplementasikannya, dan apa hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa studi kasus menonjolkan topik "keputusan" sebagai fokus utamanya. Namun, sejalan dengan hal tersebut, topik-topik lain juga ditemukan mencakup organisasi, proses, program, lingkungan, institusi bahkan peristiwa. Studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa-peristiwa yang bersangkutan tak dapat dimanipulasi.

Selanjutnya Yin memberikan ciri-ciri studi kasus yang dapat membedakan dengan metode lain. Ciri-ciri tersebut adalah :

1. Menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana:
2. Batasan-batasan antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana:
3. Multisumber bukti dimanfaatkan.

Pertanyaan pokok dari studi kasus adalah "how" dan "why" bagaimana dan mengapa, bagaimana sebuah keputusan diambil dan mengapa. Pertanyaan inilah yang kemudian dikembangkan dalam penelitian ini, locus eksplanatoris

eksploratoris, dan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif. Alasan mengambil studi kasus deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti yaitu menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kredibilitas SBY-JK dalam proses penyaluran bantuan dana pasca gempa Mei 2006 dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada persepsi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertimbangan yang dipakai peneliti dalam memilih lokasi penelitian ini adalah: Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk daerah yang terkena dampak gempa dengan jumlah korban sebagai berikut

(<http://www.bantul.go.id/rekankorbanbantul0706.pdf> diakses 10 Desember

Tabel. 1

Data Korban Gempa di Kec. Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta

No.	Kelurahan	Meninggal	Rumah rusak Total	Rumah rusak Sedang	Rumah rusak Ringan
1	Jatimulyo	2	113	486	1085
2	Mangunan	1	178	310	560
3	Dlingo	2	58	512	824
4	Muntuk	4	253	977	903
5	Temuwuh	2	150	601	998
6	Terong	7	625	494	350
	Jumlah	18	1377	3380	4720

Sumber: Gudeg Net.com

Sedangkan lokasi Kec. Dlingo yang berjarak 23 Km dari Wilayah Kab. Bantul sangat jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten, dari pemerintahan Provinsi berjarak 33 Km. Sedangkan Desa/Kelurahan terjauh berjarak 14 Km sehingga dikhawatirkan komunikasi antara masyarakat Kec. Dlingo dengan pamong/perangkat kabupaten yang berkenaan dengan informasi masalah bantuan-bantuan untuk korban gempa akan mengalami hambatan atau bahkan tidak sampai pada sasaran yang dimaksud.

Selain itu, dari observasi awal yang dilakukan peneliti didapatkan informasi dari masyarakat, meskipun seluruh korban gempa telah menerima dana bantuan dari pemerintah, tetapi dinilai sangat lamban dan terkesan tidak akurat dalam pendataan para korban, sehingga ada ketidak merataan dan salah sasaran dalam pelaksanaan mekanisme penerimaan dana bantuan tersebut, misalnya: korban yang tergolong dalam korban yang bangunannya rusak total tetapi dimasukkan dalam kategori rusak sedang atau bahkan rusak ringan. Hal tersebut yang menjadikan sering timbul perselisihan antara masyarakat dan pamong desa/dusun.

Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, bersifat alamiah, sesuai konteks karena lahir dan berada dalam konteks, harus dicari dan ditemukan, tidak reaktif dan tidak sukar ditemukan, dapat membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (Moleong, 1990 : 161).

3. Teknik Pengambilan Informan

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan sampel purposif (*nonprobabilitas*) yaitu mewawancarai sampel acak dari suatu kelompok yang diteliti. Tidak ada kriteria baku mengenai berapa jumlah responden yang harus diwawancarai. Sebagai aturan umum, peneliti berhenti melakukan wawancara sampai data menjadi jenuh. Artinya, peneliti tidak menemukan aspek baru dalam fenomena yang diteliti. Di dalam pengambilan informan, peneliti memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian (Deddy Mulyana, 2001;182-187).

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang proses penyaluran bantuan dana pasca gempa

Mei 2006 menggunakan 2 cara yaitu :

Bahkan terkesan karena lokasi Kec. Dlingo letaknya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bantul, maka masyarakatnya merasa terabaikan, bahkan sebagian besar korban gempa merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah, karena masih birokratisnya mekanisme dalam distribusi bantuan, hal tersebut yang menyebabkan tidak adanya kepercayaan terutama dari pihak lembaga-lembaga non pemerintah untuk menyerahkan bantuan maupun sekedar mendaftarkan bantuan dari lembaga kemanusiaan yang akan memberikan bantuan tersebut.

2. Sumber Data

a. Informan Penelitian

- a) Korban bencana gempa bumi di Kec. Dlingo yang mengalami permasalahan penerimaan dana bantuan berdasarkan kriteria kerusakan rumah yaitu: 2 orang informan penelitian rumah rusak total , 2 orang informan penelitian rumah rusak sedang, dan 2 orang informan penelitian rumah rusak ringan.
- b) Pamong Kecamatan Dlingo 2 orang yang terlibat dalam penanganan korban dan pengelolaan mekanisme dana bantuan bagi korban gempa Mei 2006.

b. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, laporan, peraturan dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Lincoln dan Guba menyebutkan

a. Wawancara Mendalam

Yang dimaksud dengan wawancara mendalam adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dengan cara menyampaikan pertanyaan kepada responden, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya. Untuk itu dibutuhkan keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman, artinya tidak ragu dan takut menyampaikan pertanyaan (Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1989: 192).

Wawancara ini dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat, guna mendapatkan data yang rinci dan mendalam, serta dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan masalah yang sedang diteliti. Meskipun peneliti merancang beberapa daftar pertanyaan wawancara, fungsinya tak lebih hanya sebagai pemandu peneliti dalam wawancara itu, bahkan ada kemungkinan peneliti tidak memerlukan panduan tertulis pada saat melakukan wawancara. artinya peneliti memiliki panduan wawancara (*interview guide*), namun pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban responden. Dengan model wawancara ini, peneliti mampu memperoleh informasi-informasi penting berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui studi pustaka, dalam hal ini membaca, mengkaji, mempelajari buku/literatur, catatan kepustakaan, dokumen yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga mencari data pendukung lain yang diperlukan seperti: bacaan, literatur, booklet, majalah, koran dsb, yang terkait dengan masalah penelitian (Singarimbun dan Effendi; 1989 : 70-79).

5. Teknik Analisa Data

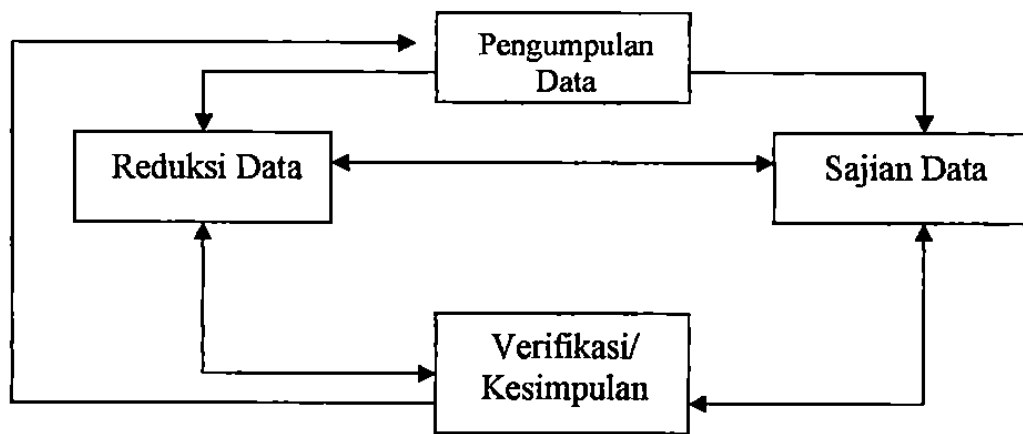
Dalam penelitian ini digunakan jenis analisis data *interactive model of analysis*. Menurut Moleong (1990:190), dalam model ini ada tiga komponen pokok dalam analisis interaktif, yaitu *data reductions* (dengan membuat abstraksi/rangkuman proses agar tetap di dalamnya), *data display* (dikategorisasikan sambil *coding* data), dan *conclusion drawing* (dengan memeriksa keabsahan data dan mengolah serta menafsirkan data-data).

Data *reductions* merupakan seleksi pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar (dari *fieldnote*) yang ada di lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung terus menerus selama pelaksanaan penelitian sampai laporan akhir.

Data *display* atau sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memunculkan kesimpulan data dilakukan. Pada bagian

ini peneliti merakit informasi-informasi yang telah diperoleh selama penelitian untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

Analisis yang ketiga adalah *conclusion drawing*, yaitu suatu penarikan kesimpulan atau verifikasi dari hasil penelitian. Dari uraian di atas dapat digambarkan dalam skema analisis sebagai berikut:



Gambar 3

Skema Analisis Penelitian

Pada penelitian data yang dikumpulkan dari nara sumber akan di *cross check* dengan sumber pembanding dari bagian lain, sebagai verifikasi data. Dari langkah verifikasi ini kemudian data direduksi untuk disajikan dalam suatu kesimpulan untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang terjadi.

6. Validitas Data

Penelitian ini menggunakan cara triangulasi sumber data yang mengumpulkan data sejenis dari berbagai sumber data yang berbeda. Dengan demikian kebenaran data yang satu akan dikonfirmasi

dengan data yang diperoleh dari sumber data yang lain, sehingga data-data yang terkumpul dalam penelitian ini akan terjamin validitasnya.

Menurut Lexi J. Moleong (1990: 178), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah membandingkan atau mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Narasumber yang diambil adalah pamong/pegawai Kec Dlingo yang berkompeten dengan masalah penyaluran bantuan dana korban gempa dan masyarakat, dan atau tokoh Masyarakat Kec. Dlingo korban gempa yang berhak menerima bantuan sebagai sebagai *cross check* atau sumber pembandingan.